



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

**JL. PAHLAWAN NO.9 TELP. 8311174
(20 SALURAN) FAX. 8311266
SEMARANG**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, September 2024

a.n SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Asisten Administrasi

u.b

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah



ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA

Pengelola Utama Muda

NIP. 197109091996031006

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	5
BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN.....	24
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	24
3.2 Program dan Kegiatan	38
BAB IV PENUTUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Setda Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah.....	8
Tabel	3.1 Tujuan dan Sasaran	25
Tabel	3.2 Rumusan Program dan Kegiatan Setda Tahun 2022 (Perubahan) dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Setda memiliki fungsi antara lain: Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah; Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Daerah; serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah. Fungsi Setda selaku koordinator pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali atas upaya pencapaian target-target pembangunan daerah. Guna melaksanakan fungsi tersebut diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif mulai dari perencanaan tepat sasaran, penganggaran yang proporsional serta pengendalian dan evaluasi yang efektif.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Untuk itu, RKPD Tahun 2024 menjadi pijakan awal dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan serta sekaligus langkah awal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPD. Namun demikian dalam pelaksanaannya, berbagai dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional berpengaruh terhadap implementasi Renja Sekretariat Daerah tahun 2024. Dinamika tersebut antara lain masih berlanjutnya perang di Palestina - Israel, Rusia dan Ukraina, serta kondisi perubahan iklim yang masih terus berlanjut berdampak pada sektor pangan dan energi. Kebijakan keuangan pada beberapa negara maju pengetatan keuangan global yang mengakibatkan dinamika ekonomi yang turut berdampak pada perekonomian di dalam negeri. Selain itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer juga mempengaruhi kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi dasar dilakukannya perubahan perencanaan di tingkat perangkat daerah pada tahun 2024.

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, disusun mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah khususnya pada Kementerian/Lembaga terkait, antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Biro-Biro

lingkup Setda perlu meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di Jawa Tengah dengan pemanfaatan teknologi informasi. Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran APBD Setda Provinsi Jawa Tengah. Perubahan Rencana Kerja Setda Tahun 2024 didasarkan pada penyesuaian target kinerja serta pendanaannya. Dokumen Perubahan Renja Setda Tahun 2024 ini menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan di sembilan biro lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah.

12. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 perihal Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 tahun 2021

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

18. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/435 tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024.

13. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga program dan kegiatan berjalan secara sistematis, efektif, dan efisien.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai gambaran capaian kinerja Sekretariat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2024 dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.
3. Sinergi perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.

14. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

- 2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2.5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program renja PD;
- 2.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas sembilan Biro, sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah. Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan melalui 8 Program, dengan 31 Kegiatan dan 134 Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama yang terdiri dari 3 indikator program, dengan indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah terdapat 3 indikator kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan 6 indikator sub kegiatan.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan terdapat 1 indikator kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat 3 indikator dan 3 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.

2. Program Kesejahteraan Rakyat

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari 3 indikator program, dengan indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual terdapat 2 indikator kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.
- b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdapat 3 indikator kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.
- c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdapat 2 indikator dan 2 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.

3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Hukum yang terdiri dari 4 indikator program, dengan indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan terdapat 4 indikator kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan 8 indikator sub kegiatan.
- b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum terdapat 2 indikator kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan 4 indikator sub kegiatan.

4. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program tersebut terdiri dari 8 indikator program yang diampu/dilaksanakan oleh Biro Perekonomian sebanyak 5 indikator program, dengan indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian terdapat 4 indikator kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan 4 indikator sub kegiatan.
- b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD terdapat 6 indikator kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan 6 indikator sub kegiatan.

Sedangkan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam mengampu 3 indikator program pada Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi SDA sebanyak 7 indikator kegiatan dengan 3 sub kegiatan sebanyak 8 indikator sub kegiatan.

5. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari 3 indikator program, dengan indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 1 indikator kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan 5 indikator sub kegiatan.
- b. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdapat 1 indikator kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.
- c. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 1 indikator dan 3 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.

6. Program Penataan Organisasi

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Organisasi yang terdiri dari 8 indikator program, dengan indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdapat 3 indikator kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.
- b. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdapat 5 indikator kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan 5 indikator sub kegiatan.

7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program tersebut diampu/dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari 5 indikator program, dengan indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdapat 6 indikator kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan 6 indikator sub kegiatan.
- b. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terdapat 3

indikator kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.

8. Program Administrasi Umum

Program tersebut dilaksanakan oleh seluruh Biro-biro lingkup Setda yang terdiri dari 13 indikator program, dengan indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 1 indikator kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan 4 indikator sub kegiatan.
- b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pelaksanaan Tugas Pemerintahan terdapat 1 indikator Kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan 2 indikator sub kegiatan.
- c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdapat 1 indikator dan 1 sub kegiatan dengan 1 indikator sub kegiatan.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 1 indikator dan 2 sub kegiatan dengan 2 indikator sub kegiatan.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 1 indikator dan 6 sub kegiatan dengan 6 indikator sub kegiatan.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 1 indikator dan 3 sub kegiatan dengan 5 indikator sub kegiatan.
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat 1 indikator dan 2 sub kegiatan dengan 2 indikator sub kegiatan.
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 1 indikator dan 1 sub kegiatan dengan 1 indikator sub kegiatan.
- i. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan terdapat 1 indikator dan 3 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.
- j. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 10 indikator dan 19 sub kegiatan dengan 20 indikator sub kegiatan.
- k. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 2 indikator dan 3 sub kegiatan dengan 3 indikator sub kegiatan.
- l. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdapat 1 indikator dan 2 sub kegiatan dengan 2 indikator sub kegiatan.

Evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Renja Setda Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan Kedua dan perkiraan capaian sampai akhir Tahun 2023, sebagaimana dituangkan dalam Tabel 2.1.

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN: XX.X									
1	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang *	100	Na		100	50	50,00%	50%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	100	Na		100	50	50,00%	50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	100	Na		100	50	50,00%	50%
2	BIRO HUKUM								
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	2	Na		1	1	100,00%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	100	Na		100	100	100,00%	100%
3	BIRO PEMBANGUNAN DAERAH								
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	90	Na		90	80,60	89,56%	90%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100	Na		100	50	50,00%	50%
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	100	Na		100	100	100,00%	100%
4	BIRO PEREKONOMIAN								
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	100	Na		100	100	100,00%	100%
5	BIRO KESEJAHTERAAN								
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	100	Na		100	40	40,00%	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	100	Na		100	100	100,00%	100%
6	BIRO ORGANISASI								
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	100	Na		100	100	100,00%	100%
8	BIRO PEMERINTAH, OTONOMI DAN KERJASAMA								
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100	Na		100	50	50,00%	50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	100	Na		100	100	100,00%	100%
9	BIRO APBJ								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	Na		100	100	100,00%	100%
7	BIRO UMUM								
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100	Na		100	100	100,00%	100%
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	Na		100	100	100,00%	100%
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	36	Na		12	6	50,00%	17%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	36	Na		12	6	50,00%	17%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	36	Na		12	6	50,00%	17%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	100	Na		100	100	100,00%	100%
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	Na		100	100	100,00%	100%
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	6	Na		2	0	0,00%	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	36	Na		12	6	50,00%	17%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	2499	Na		833	382	45,86%	15%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	36	Na		12	6	50,00%	17%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	100	Na		100	100	100,00%	100%
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	36	Na		12	6	50,00%	17%
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	36	Na		12	6	50,00%	17%
URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH									
1	BIRO ORGANISASI								
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	74	Na		66	33	50,00%	44,59%
		Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya *	91,43	80		85,71	42,85	49,99%	46,87%
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	91,43	Na		85,71	42,85	49,99%	46,87%
		Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	20	Na		14,269	7,14	50,04%	35,70%
		Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	82	Na		60	30	50,00%	36,59%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
		Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	71,43	Na		64,28	32,14	50,00%	45,00%
		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	94	100		50	25	50,00%	26,60%
		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	93,86	85,63		88,73	44,36	49,99%	47,26%
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi **	3	2		4	2	50,00%	66,67%
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota **	6	4		4	2	50,00%	33,33%
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota **	3	2		4	2	50,00%	66,67%
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota **	6	3		3	1	33,33%	16,67%
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD **	6	8		4	2	50,00%	33,33%
		Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya **	6	2		4	2	50,00%	33,33%
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan **	6	2		4	2	50,00%	33,33%
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik **	12	2		4	2	50,00%	16,67%
2	BIRO PEMERINTAH, OTONOMI DAN KERJASAMA								
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95	95		95	52,3	55,05%	55,05%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
		Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti *	95	90		95	50	52,63%	52,63%
		Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah *	95	95		95	52	54,74%	54,74%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti **	95	95		95	57	60,00	60,00%
		Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti **	95	95		95	50	52,63	52,63%
		Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah **	95	95		95	50	52,63	52,63%
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ **	60	10		8	4	50,00%	6,67%
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD **	95	95		95	57	60,00%	60,00%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM **	45	3		3	1	33,33%	2,22%
		Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan **	100	100		100	50	50,00%	50,00%
3	BIRO KESEJAHTERAAN								
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik *	63	42		54	25	46,30%	39,68%
		Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar *	85	95		81	40	49,38%	47,06%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
		Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar *	85	95		82	40	48,78%	47,06%
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku **	12	3		4	2	50,00%	16,67%
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan **	12	3		4	2	50,00%	16,67%
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan **	12	3		4	2	50,00%	16,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan **	12	3		4	2	50,00%	16,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial **	12	3		4	2	50,00%	16,67%
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan **	12	3		4	2	50,00%	16,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana **	12	3		4	2	50,00%	16,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi kependudukan **	12	3		4	2	50,00%	16,67%
4	BIRO HUKUM								
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan *	97	100		96	50	52,08%	51,55%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	96	Na		96	75	78,13%	78,13%
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani *	96	100		96	49	51,04%	51,04%
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM *	96	96		96	51	53,13%	53,13%
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur **	36	12		12	6	50,00%	16,67%
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur **	36	12		12	6	50,00%	16,67%
		Jumlah dokumen kajian produk hukum **	36	12		12	6	50,00%	16,67%
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota **	36	12		12	6	50,00%	16,67%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara **	36	12		12	6	50,00%	16,67%
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **	36	12		12	6	50,00%	16,67%
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA								#DIV/0!
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian *	87	90		87	50	57,47%	57,47%
		Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan *	85	95		85	50	58,82%	58,82%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
		Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur *	85	96		85	50	58,82%	58,82%
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian **	6	3		2	1	50,00%	16,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan **	6	2		2	1	50,00%	16,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan **	6	2		2	1	50,00%	16,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM **	6	2		2	1	50,00%	16,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan **	6	2		2	1	50,00%	16,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **	6	2		2	1	50,00%	16,67%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **	6	2		2	1	50,00%	16,67%
	BIRO PEREKONOMIAN								#DIV/0!
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan *	85	82		83	55	66,27%	64,71%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan *	80	77		78	38	48,72%	47,50%
		Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan *	87	85		85	40	47,06%	45,98%
		Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha *	83	80		81	40	49,38%	48,19%
		Nilai kemandirian BLUD *	57	55		55	35	63,64%	61,40%
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro **	15	2		4	2	50,00%	13,33%
		jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan **	12	2		4	2	50,00%	16,67%
		jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro **	14	2		4	2	50,00%	14,29%
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan **	12	3		4	2	50,00%	16,67%
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan **	6	4		2	1	50,00%	16,67%
		Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan **	6	2		2	1	50,00%	16,67%
		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha **	6	3		2	1	50,00%	16,67%
		Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha **	6	2		2	1	50,00%	16,67%
		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD **	6	2		2	1	50,00%	16,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
		Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD **	6	2		2	1	50,00%	16,67%
	BIRO APBJ								
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa *	92	95		90	78,71	87,46%	85,55%
		Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi *	83	92		80	62,39	77,99%	75,17%
		Efektivitas Pengadaan secara Elektronik *	85	90		80	62,39	77,99%	73,40%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa **	12	5		4	2	50,00%	16,67%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa **	12	4		4	2	50,00%	16,67%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa **	12	4		4	2	50,00%	16,67%
	BIRO PEMBANGUNAN DAERAH								
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Capaian Pelaksanaan APBD *	98,85	98,5		98,7	44,54	45,13%	45,06%
		Capaian Pelaksanaan APBN *	95,5	95,5		95,5	33,75	35,34%	35,34%
		Persentase realisasi bantuan	85	85		85	20	23,53%	23,53%
		Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah *	87	85		85	83	97,65%	95,40%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi *	100	100		100	50	50,00%	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD **	15	3		4	2	50,00%	13,33%
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD **	15	3		4	2	50,00%	13,33%
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN **	15	2		4	2	50,00%	13,33%
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I **	27	8		8	4	50,00%	14,81%
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II **	27	8		8	4	50,00%	14,81%
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III **	24	8		8	4	50,00%	16,67%
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap **	93	90		91	93	102,20%	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	15	4		4	2	50,00%	13,33%
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	9	4		2	1	50,00%	11,11%

Keterangan:

* Indikator Program

** Indikator Kegiatan

*** Indikator Sub Kegiatan

Pelaksanaan kinerja pada perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II sebanyak 47 indikator kinerja program, sebagai berikut:

- Terdapat 9 indikator program **optimis tercapai**, antara lain:
 - 1) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani
 - 2) Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Nilai kemandirian BLUD
 - Presentase capaian kinerja program bidang pertanian
 - Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan
 - 3) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa
 - 4) Program Penataan Organisasi
 - Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya
 - Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya
 - Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya
 - 5) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
 - Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah
- Terdapat 17 indikator program yang **tercapai sesuai target** antara lain:
 - 1) Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan
 - Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha
 - 2) Program Penataan Organisasi
 - Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat
 - Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat
 - 3) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
 - Persentase realisasi bantuan keuangan
- Sedangkan sebanyak 21 indikator program **akan tercapai targetnya** pada akhir tahun, antara lain:
 - 1) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - Efektivitas kerjasama daerah
 - Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti

- Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah
- 2) Program Kesejahteraan Rakyat
 - Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik
 - Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar
 - Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar
 - 3) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan
 - Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi
 - Persentase kabupaten/kota peduli HAM
 - 4) Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan
 - Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan
 - Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur
 - 5) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi
 - Efektivitas Pengadaan secara Elektronik
 - 6) Program Penataan Organisasi
 - Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD
 - Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan
 - 7) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
 - Capaian Pelaksanaan APBD
 - Capaian Pelaksanaan APBN
 - Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi
 - 8) Program Administrasi Umum
 - Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda

BAB III
RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Guna memecahkan permasalahan dan penanganan berbagai isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan rumusan Tujuan Setda Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah.

Pada Tujuan Pertama dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah dengan indikator Indeks Kematangan Kebijakan memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil.

Adapun dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil, ditetapkan tiga Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

- 1.1. Persentase capaian kinerja program perangkat daerah Setda lingkup Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- 1.2. Persentase capaian kinerja program perangkat daerah Setda lingkup Perekonomian, dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- 1.3. Persentase capaian kinerja program perangkat daerah Setda lingkup Administrasi, Organisasi, dan Pembangunan Daerah.

Sedangkan pada Tujuan Kedua dalam Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah memiliki dua sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Setda, dengan satu Indikator Kinerja Sasaran yaitu:
 - 1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah Setda, dengan satu Indikator Kinerja Sasaran yaitu:
 - 2.1. Meningkatnya Manajemen Risiko

Berikut Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Perubahan, sebagaimana dituangkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024	Target Perubahan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah		Indeks Kematangan Kebijakan□	Angka	36.10	36,1
		Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	90
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	90
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	80
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76	76
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	82
		Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	3

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Setda Provinsi Jateng Tahun 2024 pada sasaran “Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil”, diwujudkan dan didukung melalui pelaksanaan tujuh Program di delapan Biro-biro lingkup Setda TA. 2024 yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
2. Program Kesejahteraan Rakyat pada Biro Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum;
4. Program Perekonomian dan Pembangunan pada Biro Perekonomian dan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
5. Program Pelayanan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan pada Biro Pembangunan Daerah; dan
7. Program Penataan Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” dan sasaran “Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah” didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Setda dilaksanakan oleh sembilan Biro-biro lingkup Setda.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penambahan dan pergeseran melalui agenda-agenda pada program dan kegiatan, antara lain:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk agenda Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah; serta Desk pemantauan kesiapan logistik serta sinergitas pelaporan Pilkada Kabupaten/Kota serentak Tahun 2024.
2. Program Kesejahteraan Rakyat untuk agenda Rapat-rapat Koordinasi kegiatan prioritas Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB, CSR dan Pameran Desa Dampingan; serta kegiatan Jateng Bersholawat Peringatan Hari Santri.
3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum untuk agenda Koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur ke Provinsi lain, Kementerian terkait, Perangkat Daerah terkait dan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Sosialisasi, Rakor, Pembinaan dan Pengawasan bidang hukum dan JDIH; Penanganan perkara Litigasi di lembaga peradilan; serta Fasilitasi pelaporan Aksi HAM Daerah, peringatan hari HAM Se-Dunia dan Rakor Teknis di Bidang HAM Provinsi Jawa Tengah.
4. Program Perekonomian dan Pembangunan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam untuk agenda Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dalam rangka dukungan pelaksanaan kegiatan DBHCHT Tahun 2024.

5. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk agenda Fasilitasi perencanaan pengadaan barang dan jasa; serta Penyusunan SHB.
6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan untuk agenda Desk dan Fasilitasi pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN; Dukungan pelaksanaan program prioritas PKE dan P3DN di Jawa Tengah; Sinkronisasi dan penyesuaian pada aplikasi e-RKO dan e-Controlling dengan SIPD; Pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah I, II dan III pada kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se-Jawa Tengah; serta Rekonsiliasi pelaporan kegiatan APBD berikut capaian kinerja Perangkat Daerah dan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa di Jawa Tengah;
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, antara lain:
 - a. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama untuk agenda Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Pemerintahan dan Biro Pemotda KS;
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat untuk agenda kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan dalam daerah; serta Pendampingan program Desa Dampungan;
 - c. Biro Pembangunan Daerah untuk agenda Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke dalam dan luar daerah; Fasilitasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan penyusunan IKK, SAKIP, RB dan MR Setda.
 - d. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam untuk agenda Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dengan OPD dan Stakeholder terkait.
 - e. Biro Hukum untuk agenda Sosialisasi regulasi di bidang cukai; dan
 - f. Biro Umum untuk agenda Fasilitasi dan koordinasi Keprotokolan dan Kehumasan; Pemenuhan sarpras dan Pemeliharaan sarpras; serta Fasilitasi TU Rumah Tangga Pimpinan bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.

Perubahan program dan kegiatan dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah serta berdasarkan prinsip efektif, efisien dan akuntabel. Beberapa Target Kinerja mengalami perubahan, sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota pada indikator Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah (I)70, (II)75, dan (III)75 orang menjadi (I)120, (II)127, dan (III)120 orang;
 - Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM pada indikator Jumlah

Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari sebanyak 7 menjadi 12 sengketa hukum.

2. Program Penataan Organisasi

- Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan Sub Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada indikator Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD dari 12 Laporan menjadi 4 Laporan; Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan pada indikator Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan dari 12 Laporan menjadi 4 Laporan; Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik pada indikator Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik dari 12 Laporan menjadi 6 Laporan.
- Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi pada indikator Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dari 12 Laporan menjadi 4 Laporan dan Jumlah laporan koordinasi, fasilitasi dan indikator Asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah dari 12 Laporan menjadi 2 Laporan; serta Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota pada indikator Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kab/Kota dari 12 Laporan menjadi 4 Laporan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Biro Hukum pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan pada indikator Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT dari sebanyak 800 orang menjadi 1.650 orang.
- Biro Umum pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up dan Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan bagi KD dan WKDH pada Kepala Daerah masing-masing dari sebanyak 4 menjadi 8 orang, sedangkan Wakil Kepala Daerah dari sebanyak 4 menjadi 0 orang atau tidak dilaksanakan.

Berikut rencana kinerja Program dan Kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Perubahan Tahun 2024, sebagaimana dituangkan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan) Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									157.674.449.000	434.559.513.000	435.200.051.000	Sekretariat Daerah
				Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36,1	36,1	36,1				
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								157.674.449.000	434.559.513.000	435.200.051.000	Sekretariat Daerah
				Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah*	%	80	80	80	3.395.656.000	3.395.656.000	3.560.656.000	
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.710.656.000	1.710.656.000	1.710.656.000	Biro Organisasi
				Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB**	%	14,29	14,29	14,29	170.000.000	170.000.000	161.579.000	
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						170.000.000	170.000.000	161.579.000	
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota***	Dokumen	4	4	4	170.000.000	170.000.000	161.579.000	
		4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						170.000.000	170.000.000	161.579.000	
				Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota****	Laporan	4	4	4	170.000.000	170.000.000	161.579.000	
				Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya**	%	85,71	85,71	85,71	150.470.000	150.470.000	150.470.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						150.470.000	150.470.000	150.470.000	
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota***	Dokumen	4	4	4	150.470.000	150.470.000	150.470.000	
		4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota						150.470.000	150.470.000	150.470.000	
				Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota****	Laporan	12	12	4	150.470.000	150.470.000	150.470.000	
				Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A**	%	64,28	64,28	64,28	272.861.000	272.861.000	272.861.000	
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						272.861.000	272.861.000	272.861.000	
				Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya***	Dokumen	4	4	4	272.861.000	272.861.000	272.861.000	
		4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						272.861.000	272.861.000	272.861.000	
				Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota****	Laporan	4	4	4	272.861.000	272.861.000	272.861.000	
				Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan**	%	50	50	50	314.520.000	314.520.000	314.520.000	
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						314.520.000	314.520.000	314.520.000	
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan***	Dokumen	4	4	4	314.520.000	314.520.000	314.520.000	
		4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						314.520.000	314.520.000	314.520.000	
				Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan****	Laporan	12	12	4	314.520.000	314.520.000	314.520.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif**	%	88,1	88,1	88,1	179.500.000	179.500.000	179.500.000	
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						179.500.000	179.500.000	179.500.000	
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota***	Dokumen	4	4	4	179.500.000	179.500.000	179.500.000	
		4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan						179.500.000	179.500.000	179.500.000	
				Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota****	Laporan	4	4	4	179.500.000	179.500.000	179.500.000	
				Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A**	%	60	60	60	95.785.000	95.785.000	104.206.000	
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						95.785.000	95.785.000	104.206.000	
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD***	Dokumen	4	4	4	95.785.000	95.785.000	104.206.000	
		4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						95.785.000	95.785.000	104.206.000	
				Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD****	Laporan	12	12	4	95.785.000	95.785.000	104.206.000	
				Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi**	%	66	66	66	214.000.000	214.000.000	214.000.000	
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						214.000.000	214.000.000	214.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi***	Dokumen	4	4	4	214.000.000	214.000.000	214.000.000	
		4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						214.000.000	214.000.000	214.000.000	
				Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah****	Laporan	12	12	4	153.680.000	153.680.000	160.026.000	
				Jumlah laporan koordinasi, fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah****	Laporan	12	12	2	60.320.000	60.320.000	53.974.000	
				Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan**	%	88,73	88,73	88,73	313.520.000	313.520.000	313.520.000	
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						313.520.000	313.520.000	313.520.000	
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik***	Dokumen	4	4	4	313.520.000	313.520.000	313.520.000	
		4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						313.520.000	313.520.000	313.520.000	
				Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik****	Laporan	12	12	6	313.520.000	313.520.000	313.520.000	
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1.685.000.000	1.685.000.000	1.850.000.000	Biro Adm. Pembangunan Daerah
				Persentase capaian pelaksanaan APBD**	%	98,7	98,7	98,7	415.000.000	415.000.000	450.000.000	
		4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						415.000.000	415.000.000	450.000.000	
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD***	Dokumen	4	4	4	195.000.000	195.000.000	230.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						195.000.000	195.000.000	230.000.000	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD****	Laporan	12	12	12	195.000.000	195.000.000	230.000.000	
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD****	Dokumen	4	4	4	220.000.000	220.000.000	220.000.000	
		4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						220.000.000	220.000.000	220.000.000	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD****	Laporan	12	12	12	220.000.000	220.000.000	220.000.000	
				Persentase capaian pelaksanaan APBN**	%	95,5	95,5	95,5	210.000.000	210.000.000	235.000.000	
		4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						210.000.000	210.000.000	235.000.000	
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN****	Dokumen	4	4	4	210.000.000	210.000.000	235.000.000	
		4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						210.000.000	210.000.000	235.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN****	Laporan	8	8	8	210.000.000	210.000.000	235.000.000	
				Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah**	%	85	85	85	467.000.000	467.000.000	502.000.000	
		4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						467.000.000	467.000.000	502.000.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah***	Dokumen	4	4	4	120.000.000	120.000.000	135.000.000	
		4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah						120.000.000	120.000.000	135.000.000	
				Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah****	Dokumen	4	4	4	120.000.000	120.000.000	135.000.000	
				Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap***	%	91	91	91	347.000.000	347.000.000	367.000.000	
		4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						347.000.000	347.000.000	367.000.000	
				Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah****	Dokumen	12	12	12	347.000.000	347.000.000	367.000.000	
				Persentase realisasi bantuan keuangan**	%	85	85	85	490.000.000	490.000.000	550.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						490.000.000	490.000.000	550.000.000	
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I***	Dokumen	8	8	8	207.225.000	207.225.000	262.725.000	
		4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						207.225.000	207.225.000	262.725.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I****	Dokumen	8	8	8	207.225.000	207.225.000	262.725.000	
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II***	Dokumen	8	8	8	207.775.000	207.775.000	242.275.000	
		4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						207.775.000	207.775.000	242.275.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II****	Dokumen	8	8	8	207.775.000	207.775.000	242.275.000	
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III***	Dokumen	8	8	8	75.000.000	75.000.000	45.000.000	
		4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						75.000.000	75.000.000	45.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III****	Dokumen	8	8	8	75.000.000	75.000.000	45.000.000	
				Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi**	%	100	100	100	103.000.000	103.000.000	113.000.000	
		4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						103.000.000	103.000.000	113.000.000	
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah***	Dokumen	2	2	2	103.000.000	103.000.000	113.000.000	
		4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						103.000.000	103.000.000	113.000.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah****	Dokumen	2	2	2	103.000.000	103.000.000	113.000.000	
				Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat*	%	90	90	90	146.861.151.000	423.746.215.000	423.921.753.000	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						3.783.000.000	3.783.000.000	3.883.050.000	Biro Pemerintahan, Otonomi dan Kerjasama
				Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	%	95	95	95	980.000.000	980.000.000	980.000.000	
		4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						980.000.000	980.000.000	980.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ***	Dokumen	8	8	8	980.000.000	980.000.000	980.000.000	
		4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan						550.000.000	550.000.000	550.000.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan****	Dokumen	4	4	4	550.000.000	550.000.000	550.000.000	
		4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						230.000.000	230.000.000	230.000.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum****	Dokumen	4	4	4	230.000.000	230.000.000	230.000.000	
		4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah						200.000.000	200.000.000	200.000.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah****	Dokumen	4	4	4	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
				Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah**	%	95	95	95	1.630.000.000	1.630.000.000	1.730.050.000	
		4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						1.630.000.000	1.630.000.000	1.730.050.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM***	Dokumen	3	3	3	225.000.000	225.000.000	225.000.000	
		4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan						225.000.000	225.000.000	225.000.000	
				Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM****	Dokumen	4	4	4	225.000.000	225.000.000	225.000.000	
				Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD***	%	95	95	95	1.100.000.000	1.100.000.000	1.200.050.000	
		4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						1.100.000.000	1.100.000.000	1.200.050.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD****	Dokumen	45	45	45	1.100.000.000	1.100.000.000	1.200.050.000	
				Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan***	%	100	100	100	305.000.000	305.000.000	305.000.000	
		4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						305.000.000	305.000.000	305.000.000	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan****	Laporan	37	37	37	305.000.000	305.000.000	305.000.000	
				Tingkat efektivitas kerjasama daerah**	%	95	95	95	1.173.000.000	1.173.000.000	1.173.000.000	
		4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah						1.173.000.000	1.173.000.000	1.173.000.000	
				Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti***	%	95	95	95	605.000.000	605.000.000	605.000.000	
		4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah						605.000.000	605.000.000	605.000.000	
				Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri****	Dokumen	9	9	9	485.000.000	485.000.000	485.000.000	
				Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri****	Dokumen	5	5	5	120.000.000	120.000.000	120.000.000	
				Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti***	%	95	95	95	200.000.000	200.000.000	180.676.000	
		4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta						200.000.000	200.000.000	180.676.000	
				Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri****	Dokumen	6	6	6	100.000.000	100.000.000	80.676.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri****	Dokumen	4	4	4	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
				Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah***	%	95	95	95	368.000.000	368.000.000	387.324.000	
		4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						368.000.000	368.000.000	387.324.000	
				Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi****	Laporan	4	4	4	153.000.000	153.000.000	172.324.000	
				Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi****	Laporan	4	4	4	107.550.000	107.550.000	112.250.000	
				Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri****	%	100	100	100	107.450.000	107.450.000	102.750.000	
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						140.639.161.000	417.524.225.000	417.266.075.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar**	%	81	81	81	750.000.000	750.000.000	750.000.000	
		4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						750.000.000	750.000.000	750.000.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan***	Dokumen	4	4	4	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
		4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						250.000.000	250.000.000	250.000.000	
				Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan****	Dokumen	8	8	8	250.000.000	250.000.000	250.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan***	Dokumen	4	4	4	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
		4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						250.000.000	250.000.000	250.000.000	
				Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan****	Dokumen	8	8	8	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial***	Dokumen	4	4	4	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
		4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						250.000.000	250.000.000	250.000.000	
				Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial****	Dokumen	8	8	8	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
				Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar**	%	82	82	82	750.000.000	750.000.000	841.850.000	
		4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						750.000.000	750.000.000	841.850.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan***	Dokumen	4	4	4	225.000.000	225.000.000	225.000.000	
		4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						225.000.000	225.000.000	225.000.000	
				Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan****	Dokumen	8	8	8	225.000.000	225.000.000	225.000.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***	Dokumen	4	4	4	300.000.000	300.000.000	391.850.000	
		4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						300.000.000	300.000.000	391.850.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana****	Dokumen	8	8	8	300.000.000	300.000.000	391.850.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan***	Dokumen	4	4	4	225.000.000	225.000.000	225.000.000	
		4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						225.000.000	225.000.000	225.000.000	
				Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan****	Dokumen	8	8	8	225.000.000	225.000.000	225.000.000	
				Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik**	%	54	54	54	139.139.161.000	416.024.225.000	415.674.225.000	
		4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						139.139.161.000	416.024.225.000	415.674.225.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku***	Dokumen	4	4	4	139.139.161.000	416.024.225.000	415.674.225.000	
		4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						139.139.161.000	416.024.225.000	415.674.225.000	
				Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan****	Unit	750	750	750	135.231.286.000	412.116.350.000	411.516.350.000	
				Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan***	Dokumen	4	4	4	3.907.875.000	3.907.875.000	4.157.875.000	
		4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						3.907.875.000	3.907.875.000	4.157.875.000	
				Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji*****	Kegiatan	1	1	1	1.712.600.000	1.712.600.000	1.998.965.000	
				Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan****	Kegiatan	8	8	8	2.195.275.000	2.195.275.000	2.158.910.000	
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2.438.990.000	2.438.990.000	2.772.628.000	Biro Hukum
				Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani**	%	96	96	96	680.000.000	680.000.000	745.000.000	
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						680.000.000	680.000.000	745.000.000	
				Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara***	Dokumen	12	12	12	680.000.000	680.000.000	745.000.000	
		4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum						680.000.000	680.000.000	745.000.000	
				Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara****	Perkara	11	11	11	200.000.000	200.000.000	265.000.000	
				Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu****	Perkara	200	200	200	480.000.000	480.000.000	480.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase kabupaten/kota peduli HAM**	%	96	96	96	293.076.000	293.076.000	355.076.000	
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						293.076.000	293.076.000	355.076.000	
				Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah***	Dokumen	12	12	12	293.076.000	293.076.000	355.076.000	
		4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						293.076.000	293.076.000	355.076.000	
				Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM****	Dokumen	0	0	0	-	-	-	
				Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota****	Kabupaten /Kota	35	35	35	103.000.000	103.000.000	165.000.000	
				Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah****	Sengketa	7	7	12	190.076.000	190.076.000	190.076.000	
				Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan**	%	96	96	96	874.368.000	874.368.000	1.001.006.000	
		4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						874.368.000	874.368.000	1.001.006.000	
				Jumlah dokumen kajian produk hukum***	Dokumen	12	12	12	430.118.000	430.118.000	486.756.000	
		4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						430.118.000	430.118.000	486.756.000	
				Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya****	Laporan	12	12	12	287.168.000	287.168.000	327.576.000	
				Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya****	Laporan	12	12	12	142.950.000	142.950.000	159.180.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur***	Dokumen	12	12	12	44.000.000	44.000.000	44.000.000	
		4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan						44.000.000	44.000.000	44.000.000	
				Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah****	Laporan	12	12	12	44.000.000	44.000.000	44.000.000	
				Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur***	Dokumen	12	12	12	400.250.000	400.250.000	470.250.000	
		4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan						400.250.000	400.250.000	470.250.000	
				Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah****	Laporan	12	12	12	150.000.000	150.000.000	180.000.000	
				Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah****	Laporan	12	12	12	250.250.000	250.250.000	290.250.000	
				Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji**	%	96	96	96	591.546.000	591.546.000	671.546.000	
		4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						591.546.000	591.546.000	671.546.000	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota***	Dokumen	12	12	12	591.546.000	591.546.000	671.546.000	
		4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota						591.546.000	591.546.000	671.546.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I****	Dokumen	70	70	120	191.546.000	191.546.000	205.546.000	
				Jumlah Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II****	Dokumen	75	75	127	210.000.000	210.000.000	226.000.000	
				Jumlah Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III****	Dokumen	75	75	120	190.000.000	190.000.000	240.000.000	
				Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa*	%	90	90	90	7.417.642.000	7.417.642.000	7.717.642.000	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						4.912.642.000	4.912.642.000	5.112.642.000	
				Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur**	%	85	85	85	616.360.000	616.360.000	616.360.000	Biro Infrastruktur dan SDA
		4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						616.360.000	616.360.000	616.360.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***	Dokumen	2	2	2	346.560.000	346.560.000	346.560.000	
		4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						346.560.000	346.560.000	346.560.000	
				Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang****	Laporan	4	4	4	346.560.000	346.560.000	346.560.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman***	Dokumen	2	2	2	269.800.000	269.800.000	269.800.000	
		4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						269.800.000	269.800.000	269.800.000	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman****	Laporan	4	4	4	269.800.000	269.800.000	269.800.000	
				Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan**	%	85	85	85	537.760.000	537.760.000	537.760.000	
		4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						537.760.000	537.760.000	537.760.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM***	Dokumen	2	2	2	257.760.000	257.760.000	257.760.000	
		4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						257.760.000	257.760.000	257.760.000	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM****	Laporan	4	4	4	257.760.000	257.760.000	257.760.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan***	Dokumen	2	2	2	280.000.000	280.000.000	280.000.000	
		4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						280.000.000	280.000.000	280.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan****	Laporan	4	4	4	280.000.000	280.000.000	280.000.000	
				Persentase capaian kinerja program bidang pertanian**	%	87	87	87	1.246.074.000	1.246.074.000	1.446.074.000	
		4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						1.246.074.000	1.246.074.000	1.446.074.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan***	Dokumen	2	2	2	180.880.000	180.880.000	180.880.000	
		4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						180.880.000	180.880.000	180.880.000	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan****	Laporan	4	4	4	180.880.000	180.880.000	180.880.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan***	Dokumen	2	2	2	199.880.000	199.880.000	199.880.000	
		4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						199.880.000	199.880.000	199.880.000	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan****	Laporan	4	4	4	199.880.000	199.880.000	199.880.000	
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian***	Dokumen	2	2	2	865.314.000	865.314.000	1.065.314.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						865.314.000	865.314.000	1.065.314.000	
				Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT****	Laporan	2	2	2	600.000.000	600.000.000	800.000.000	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian****	Laporan	4	4	4	265.314.000	265.314.000	265.314.000	
				Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha**	%	81	81	81	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Biro Perekonomian
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						300.000.000	300.000.000	300.000.000	
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha***	Dokumen	2	2	2	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
		4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi						300.000.000	300.000.000	300.000.000	
				Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha****	Laporan	4	4	4	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
				Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan**	%	85	85	85	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan***	Dokumen	2	2	2	850.000.000	850.000.000	850.000.000	
		4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						850.000.000	850.000.000	850.000.000	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan****	Laporan	4	4	4	850.000.000	850.000.000	850.000.000	
				Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan***	Dokumen	2	2	2	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
		4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan						150.000.000	150.000.000	150.000.000	
				Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan****	Laporan	4	4	4	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
				Persentase nilai kemandirian BLUD**	%	55	55	55	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						50.000.000	50.000.000	50.000.000	
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD***	Dokumen	2	2	2	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
		4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah						25.000.000	25.000.000	25.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah****	Laporan	2	2	2	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD***	Dokumen	2	2	2	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
		4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan						25.000.000	25.000.000	25.000.000	
				Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah****	Laporan	2	2	2	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan**	%	83	83	83	462.448.000	462.448.000	462.448.000	Biro Perekonomian
		4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						462.448.000	462.448.000	462.448.000	
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan***	Dokumen	4	4	4	220.000.000	220.000.000	220.000.000	
		4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						220.000.000	220.000.000	220.000.000	
				Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan****	Laporan	8	8	8	220.000.000	220.000.000	220.000.000	
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro***	Dokumen	4	4	4	242.448.000	242.448.000	242.448.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						242.448.000	242.448.000	242.448.000	
				Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro****	Laporan	8	8	8	242.448.000	242.448.000	242.448.000	
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan**	%	78	78	78	700.000.000	700.000.000	700.000.000	
		4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						700.000.000	700.000.000	700.000.000	
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro***	Dokumen	4	4	4	315.000.000	315.000.000	315.000.000	
		4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						315.000.000	315.000.000	315.000.000	
				Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro****	Laporan	8	8	8	315.000.000	315.000.000	315.000.000	
				Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan***	Dokumen	4	4	4	385.000.000	385.000.000	385.000.000	
		4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						385.000.000	385.000.000	385.000.000	
				Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan****	Laporan	8	8	8	385.000.000	385.000.000	385.000.000	
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						2.505.000.000	2.505.000.000	2.605.000.000	Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa**	%	90	90	90	1.355.000.000	1.355.000.000	1.455.000.000	
		4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						1.355.000.000	1.355.000.000	1.455.000.000	
				Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa***	Laporan	4	4	4	1.355.000.000	1.355.000.000	1.455.000.000	
		4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						280.000.000	280.000.000	400.000.000	
				Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa****	Laporan	4	4	4	180.000.000	180.000.000	213.200.000	
				Jumlah Laporan Penyusunan SHB****	Laporan	2	2	2	100.000.000	100.000.000	186.800.000	
		4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						853.000.000	853.000.000	833.000.000	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing)****	Laporan	12	12	12	700.000.000	700.000.000	680.000.000	
				Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal****	Laporan	4	4	4	153.000.000	153.000.000	153.000.000	
		4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						222.000.000	222.000.000	222.000.000	
				Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa****	Laporan	4	4	4	222.000.000	222.000.000	222.000.000	
				Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa**	%	81	81	81	506.000.000	506.000.000	506.000.000	
		4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						506.000.000	506.000.000	506.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa***	Laporan	4	4	4	506.000.000	506.000.000	506.000.000	
		4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						157.000.000	157.000.000	157.000.000	
				Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah****	Laporan	2	2	2	157.000.000	157.000.000	157.000.000	
		4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						173.000.000	173.000.000	173.000.000	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ****	Laporan	4	4	4	173.000.000	173.000.000	173.000.000	
		4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						176.000.000	176.000.000	176.000.000	
				Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa****	Laporan	4	4	4	176.000.000	176.000.000	176.000.000	
				Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik**	%	80	80	80	644.000.000	644.000.000	644.000.000	
		4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						644.000.000	644.000.000	644.000.000	
				Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa***	Laporan	4	4	4	644.000.000	644.000.000	644.000.000	
		4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik						203.000.000	203.000.000	203.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik****	Laporan	4	4	4	203.000.000	203.000.000	203.000.000	
		4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						315.000.000	315.000.000	315.000.000	
				Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa****	Laporan	2	2	2	315.000.000	315.000.000	315.000.000	
		4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						126.000.000	126.000.000	126.000.000	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa****	Laporan	4	4	4	126.000.000	126.000.000	126.000.000	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									205.630.432.000	208.997.245.000	226.850.395.000	Sekretariat Daerah
				Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76	76	76				
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								205.440.432.000	208.807.245.000	226.645.395.000	Sekretariat Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat*	Angka	82	82	82	205.440.432.000	208.807.245.000	226.645.395.000	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						205.440.432.000	208.807.245.000	226.645.395.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan**	%	100	100	100	4.355.000.000	4.655.000.000	5.505.000.000	Biro Umum
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						25.000.000	25.000.000	25.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan***	%	100	100	100	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
		X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.000.000	25.000.000	25.000.000	
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah****	Laporan	12	12	12	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.000.000	30.000.000	30.000.000	
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan***	Laporan	12	12	12	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.000.000	30.000.000	30.000.000	
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat****	Laporan	12	12	12	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
		X.XX.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						210.000.000	210.000.000	210.000.000	
				Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan***	%	100	100	100	210.000.000	210.000.000	210.000.000	
		X.XX.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						160.000.000	160.000.000	160.000.000	
				Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan****	Paket	4	4	8	130.000.000	130.000.000	160.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan****	Paket	4	4	0	30.000.000	30.000.000	-	
		X.XX.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						50.000.000	50.000.000	50.000.000	
				Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah****	Orang	4	4	8	40.000.000	40.000.000	50.000.000	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah****	Orang	4	4	0	10.000.000	10.000.000	-	
		X.XX.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah						4.090.000.000	4.390.000.000	5.240.000.000	
				Persentase layanan fasilitasi kerumahtangaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan***	%	100	100	100	4.090.000.000	4.390.000.000	5.240.000.000	
		X.XX.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						2.950.000.000	2.950.000.000	3.600.000.000	
				Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan****	Paket	12	12	12	2.950.000.000	2.950.000.000	3.600.000.000	
		X.XX.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						40.000.000	40.000.000	40.000.000	
				Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan****	Paket	12	12	12	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
		X.XX.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						1.100.000.000	1.400.000.000	1.600.000.000	
				Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan****	Paket	12	12	12	1.100.000.000	1.400.000.000	1.600.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah**	%	100	100	100	437.104.000	437.104.000	507.104.000	Biro Adm. Pembangunan Daerah
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						437.104.000	437.104.000	507.104.000	
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah***	%	100	100	100	437.104.000	437.104.000	507.104.000	
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						362.104.000	362.104.000	432.104.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan****	Laporan	24	24	24	362.104.000	362.104.000	432.104.000	
		X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						75.000.000	75.000.000	75.000.000	
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan****	Laporan	16	16	16	75.000.000	75.000.000	75.000.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa**	%	100	100	100	261.800.000	261.800.000	261.800.000	Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						261.800.000	261.800.000	261.800.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa***	%	100	100	100	261.800.000	261.800.000	261.800.000	
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						236.800.000	236.800.000	236.800.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa****	Laporan	12	12	12	236.800.000	236.800.000	236.800.000	
		X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.000.000	25.000.000	25.000.000	
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa****	Laporan	12	12	12	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum**	%	100	100	100	526.209.000	526.209.000	876.209.000	Biro Hukum
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						350.000.000	350.000.000	700.000.000	
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum***	%	100	100	100	350.000.000	350.000.000	700.000.000	
		X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						350.000.000	350.000.000	700.000.000	
				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT****	Orang	800	800	1650	350.000.000	350.000.000	700.000.000	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						176.209.000	176.209.000	176.209.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum***	%	100	100	100	176.209.000	176.209.000	176.209.000	
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						166.000.000	166.000.000	166.000.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum****	Laporan	12	12	12	166.000.000	166.000.000	166.000.000	
		X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.209.000	10.209.000	10.209.000	
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum*****	Laporan	12	12	12	10.209.000	10.209.000	10.209.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang**	%	100	100	100	811.595.000	811.595.000	1.461.595.000	Biro Infrastruktur dan SDA
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						400.000.000	400.000.000	850.000.000	
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam***	%	100	100	100	400.000.000	400.000.000	850.000.000	
		X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						400.000.000	400.000.000	850.000.000	
				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai****	Orang	8000	8000	8000	400.000.000	400.000.000	850.000.000	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						411.595.000	411.595.000	611.595.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang***	%	100	100	100	411.595.000	411.595.000	611.595.000	
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						386.595.000	386.595.000	586.595.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan****	Laporan	12	12	12	210.000.000	210.000.000	410.000.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA****	Laporan	12	12	12	176.595.000	176.595.000	176.595.000	
		X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.000.000	25.000.000	25.000.000	
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan****	Laporan	12	12	12	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA****	Laporan	12	12	12	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat**	%	100	100	100	495.553.000	495.553.000	753.703.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						495.553.000	495.553.000	753.703.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat***	%	100	100	100	495.553.000	495.553.000	753.703.000	
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						350.000.000	350.000.000	550.000.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat****	Laporan	12	12	12	350.000.000	350.000.000	550.000.000	
		X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						145.553.000	145.553.000	203.703.000	
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat****	Laporan	12	12	12	145.553.000	145.553.000	203.703.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi**	%	100	100	100	720.772.000	1.012.512.000	1.012.512.000	Biro Organisasi
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						184.115.000	475.855.000	475.855.000	
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi****	%	100	100	100	184.115.000	475.855.000	475.855.000	
		X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						-	291.740.000	291.740.000	
				Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan****	Paket	0	1	1	-	291.740.000	291.740.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						141.115.000	141.115.000	141.115.000	
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian****	Dokumen	4	4	4	141.115.000	141.115.000	141.115.000	
		X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						43.000.000	43.000.000	43.000.000	
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan****	Orang	12	12	12	43.000.000	43.000.000	43.000.000	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						536.657.000	536.657.000	536.657.000	
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi***	%	100	100	100	536.657.000	536.657.000	536.657.000	
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						476.657.000	476.657.000	479.003.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi****	Laporan	12	12	12	230.000.000	230.000.000	230.000.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi****	Laporan	12	12	12	246.657.000	246.657.000	249.003.000	
		X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						60.000.000	60.000.000	57.654.000	
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi****	Laporan	12	12	12	20.000.000	20.000.000	20.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi****	Laporan	12	12	12	40.000.000	40.000.000	37.654.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan**	%	100	100	100	840.452.000	840.452.000	890.452.000	Biro Pemerintahan, Otonomi dan Kerjasama
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						840.452.000	840.452.000	890.452.000	
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra***	%	100	100	100	840.452.000	840.452.000	890.452.000	
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						806.246.000	806.246.000	857.571.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat****	Laporan	12	12	12	425.000.000	425.000.000	394.405.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama****	Laporan	12	12	12	381.246.000	381.246.000	463.166.000	
		X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						34.206.000	34.206.000	32.881.000	
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat****	Laporan	12	12	12	10.000.000	10.000.000	8.675.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama****	Laporan	12	12	12	24.206.000	24.206.000	24.206.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian**	%	100	100	100	290.000.000	290.000.000	290.000.000	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						290.000.000	290.000.000	290.000.000	
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian***	%	100	100	100	290.000.000	290.000.000	290.000.000	Biro Perekonomian
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						275.000.000	275.000.000	275.000.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian****	Laporan	12	12	12	275.000.000	275.000.000	275.000.000	
		X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						15.000.000	15.000.000	15.000.000	
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian****	Laporan	12	12	12	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol**	%	100	100	100	17.286.000.000	16.146.000.000	17.134.000.000	Biro Umum
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						165.000.000	165.000.000	165.000.000	
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol***	%	100	100	100	165.000.000	165.000.000	165.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						45.000.000	45.000.000	45.000.000	
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan****	Dokumen	12	12	12	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
		X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						120.000.000	120.000.000	120.000.000	
				Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah****	Dokumen	4	4	4	120.000.000	120.000.000	120.000.000	
		X.XX.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						14.870.753.000	13.730.753.000	14.110.753.000	
				Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan***	Laporan	12	12	12	14.870.753.000	13.730.753.000	14.110.753.000	
		X.XX.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan						300.000.000	300.000.000	330.000.000	
				Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan****	Dokumen	12	12	12	300.000.000	300.000.000	330.000.000	
		X.XX.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						11.570.753.000	10.430.753.000	10.880.753.000	
				Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan****	Laporan	12	12	12	11.570.753.000	10.430.753.000	10.880.753.000	
		X.XX.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan						3.000.000.000	3.000.000.000	2.900.000.000	
				Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan****	Laporan	12	12	12	3.000.000.000	3.000.000.000	2.900.000.000	
		X.XX.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan						2.250.247.000	2.250.247.000	2.858.247.000	
				Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun***	Laporan	12	12	12	2.250.247.000	2.250.247.000	2.858.247.000	
		X.XX.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						2.080.247.000	2.080.247.000	2.480.247.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara****	Laporan	12	12	12	2.080.247.000	2.080.247.000	2.480.247.000	
		X.XX.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						150.000.000	150.000.000	308.000.000	
				Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah****	Laporan	12	12	12	150.000.000	150.000.000	308.000.000	
		X.XX.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						20.000.000	20.000.000	70.000.000	
				Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan****	Laporan	1	1	1	20.000.000	20.000.000	70.000.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda**	%	100	100	100	179.415.947.000	183.331.020.000	197.953.020.000	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						108.516.013.000	108.516.013.000	108.516.013.000	
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun***	Laporan	12	12	12	108.516.013.000	108.516.013.000	108.516.013.000	
		X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						106.601.013.000	107.025.940.000	93.313.262.000	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN****	Bulan	12	12	12	106.601.013.000	107.025.940.000	93.313.262.000	
		X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.540.000.000	1.540.000.000	1.390.000.000	
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN****	Dokumen	12	12	12	1.540.000.000	1.540.000.000	1.390.000.000	
		X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						300.000.000	300.000.000	400.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah****	Laporan	12	12	12	300.000.000	300.000.000	400.000.000	
		X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD						75.000.000	75.000.000	125.000.000	
				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah****	Laporan	12	12	12	75.000.000	75.000.000	125.000.000	
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						742.000.000	782.000.000	852.000.000	
				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***	Laporan	12	12	12	742.000.000	782.000.000	852.000.000	
		X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						442.000.000	442.000.000	442.000.000	
				Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah****	Dokumen	12	12	12	442.000.000	442.000.000	442.000.000	
		X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						300.000.000	300.000.000	350.000.000	
				Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah****	Laporan	12	12	12	300.000.000	300.000.000	350.000.000	
		X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						20.000.000	20.000.000	30.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah***	Laporan	12	12	12	20.000.000	20.000.000	30.000.000	
		X.XX.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						20.000.000	20.000.000	30.000.000	
				Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah****	Laporan	12	12	12	20.000.000	20.000.000	30.000.000	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						7.418.996.000	8.218.996.000	9.375.996.000	
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda***	%	100	100	100	7.418.996.000	8.218.996.000	9.375.996.000	
		X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						352.437.000	352.437.000	402.437.000	
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan****	Paket	12	12	12	352.437.000	352.437.000	402.437.000	
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500.718.000	500.718.000	580.718.000	
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan****	Paket	12	12	12	500.718.000	500.718.000	580.718.000	
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						425.000.000	425.000.000	425.000.000	
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan****	Paket	12	12	12	425.000.000	425.000.000	425.000.000	
		X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						120.000.000	120.000.000	140.000.000	
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan****	Paket	12	12	12	120.000.000	120.000.000	140.000.000	
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						150.000.000	150.000.000	150.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan****	Paket	12	12	12	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
		X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.241.605.000	4.241.605.000	4.648.605.000	
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu****	Laporan	12	12	12	4.241.605.000	4.241.605.000	4.648.605.000	
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.629.236.000	2.429.236.000	3.029.236.000	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah****	Laporan	12	12	12	1.629.236.000	2.429.236.000	3.029.236.000	
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.835.500.000	4.025.500.000	15.500.500.000	
				Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan***	Paket	2	2	2	3.835.500.000	4.025.500.000	15.500.500.000	
		X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						810.500.000	810.500.000	1.510.500.000	
				Jumlah paket mebel yang disediakan****	Paket	2	2	2	810.500.000	810.500.000	1.510.500.000	
		X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.025.000.000	3.215.000.000	13.990.000.000	
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan****	Unit	50	50	50	3.025.000.000	3.215.000.000	13.990.000.000	
		X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						-	-	-	
				Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan****	Unit				-	-	-	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.231.213.000	24.381.213.000	24.771.213.000	
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda***	Laporan	12	12	12	24.231.213.000	24.381.213.000	24.771.213.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan****	Laporan	12	12	12	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	
		X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						631.213.000	631.213.000	781.213.000	
				Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan****	Laporan	12	12	12	631.213.000	631.213.000	781.213.000	
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						16.600.000.000	16.750.000.000	16.990.000.000	
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan****	Laporan	12	12	12	16.100.000.000	16.250.000.000	16.490.000.000	
				Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum****	Laporan	4	4	4	200.000.000	200.000.000	226.500.000	
				Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah****	Laporan	2	2	2	300.000.000	300.000.000	273.500.000	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.658.908.000	7.858.908.000	9.378.908.000	
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan***	Unit	833	833	833	6.658.908.000	7.858.908.000	9.378.908.000	
		X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						250.000.000	250.000.000	250.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya****	Unit	4	4	4	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.775.000.000	1.975.000.000	2.325.000.000	
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya****	Unit	182	182	182	1.775.000.000	1.975.000.000	2.325.000.000	
		X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						87.500.000	87.500.000	87.500.000	
				Jumlah mebel yang dipelihara****	Unit	30	30	30	87.500.000	87.500.000	87.500.000	
		X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.400.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara****	Unit	300	300	300	1.400.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.833.908.000	3.833.908.000	4.833.908.000	
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi***	Unit	17	17	17	2.833.908.000	3.833.908.000	4.833.908.000	
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						312.500.000	312.500.000	382.500.000	
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi***	Unit	300	300	300	312.500.000	312.500.000	382.500.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		X.XX.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						27.993.317.000	29.528.390.000	29.528.390.000	
				Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda***	%	100	100	100	27.993.317.000	29.528.390.000	29.528.390.000	
		X.XX.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						243.094.000	2.203.094.000	2.203.094.000	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah****	Orang	2	2	2	243.094.000	2.203.094.000	2.203.094.000	
		X.XX.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						27.750.223.000	27.325.296.000	27.325.296.000	
				Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah****	Orang	2	2	2	27.750.223.000	27.325.296.000	27.325.296.000	
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah								190.000.000	190.000.000	205.000.000	Sekretariat Daerah
				Indeks Manajemen Risiko*	Angka	3	3	3	190.000.000	190.000.000	205.000.000	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						190.000.000	190.000.000	205.000.000	
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah**	%	90	90	90	190.000.000	190.000.000	205.000.000	
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						190.000.000	190.000.000	205.000.000	Biro Adm. Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran*, Program**, Kegiatan***, Sub Kegiatan****)	Satuan	Tahun 2024						Unit Kerja Perangkat Daerah
						Target			Pagu			
						Renja PD	APBD	P-Renja	Renja PD	APBD	P-Renja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan***	%	100	100	100	190.000.000	190.000.000	205.000.000	
		X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						110.000.000	110.000.000	110.000.000	
				Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah****	Dokumen	6	6	6	110.000.000	110.000.000	110.000.000	
		X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000	80.000.000	95.000.000	
				Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah****	Laporan	8	8	8	80.000.000	80.000.000	95.000.000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berisi penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang mengalami penyesuaian, sebagai respon atas berbagai dinamika kebijakan dan pelaksanaan APBD serta sinergi pencapaian target RPD 2024-2026. Perubahan dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah serta berdasarkan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.

Guna menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan beberapa tahapan, antara lain: Evaluasi kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan hingga triwulan II; Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kinerja berikut dengan alternatif upaya penyelesaiannya; Perumusan langkah penyesuaian baik pada anggaran, target kinerja maupun agenda kegiatan.

Berlanjutnya perang di Palestina - Israel, Rusia dan Ukraina, serta kondisi perubahan iklim yang masih terus berlanjut berdampak pada sektor pangan dan energi dan persiapan pengkoordinasian pelaksanaan Pemilukada serempak yang akan dilaksanakan pada Akhir tahun 2024 menjadi tantangan yang harus dihadapi. Hal tersebut mendasari perubahan terhadap anggaran belanja Sekretariat Daerah. Anggaran kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan berdasarkan kebutuhan belanja atas aktivitas agenda yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip efektif dan efisien.

Inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran. Pencapaian target-target kinerja tahun 2024 diharapkan mampu mendukung tercapainya target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026.